

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era pasca-reformasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pembangunan desa, mengubah pemerintahan desa dari sekadar pelaksana arahan tingkat atas menjadi agen penting dalam tata kelola dan pembangunan lokal. Desa kini memainkan peran sentral dalam mengelola inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unik masyarakatnya. Transisi ini menempatkan desa sebagai unit pemerintahan strategis yang bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif warga dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Sebagai wujud implementasi kebijakan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Desa didorong menjadi pusat penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dengan prinsip gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Dalam konteks ini, pemerintah desa memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal.

Penguatan peran desa tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa yang memberikan penguatan terhadap posisi desa dalam sistem pemerintahan nasional, termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, keberlanjutan pembangunan desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal yang mampu mendorong kemandirian desa. Melalui regulasi tersebut, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan membangun kelembagaan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan desa memiliki dua peran kunci dalam pembangunan ekonomi lokal yaitu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan mengelola pemerintahan. Selain menjalankan tugas administratif, pemerintahan desa juga harus berperan sebagai katalisator transformasi sosial dan ekonomi dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya konstruktif. Pembentukan organisasi ekonomi desa seperti koperasi, yang menyediakan platform bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi secara demokratis dan berkelanjutan, merupakan salah satu contoh nyata dari fungsi ini. Pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memulai, menjalankan, dan mengawasi koperasi untuk memastikan koperasi tersebut mengikuti prinsip-prinsip ekonomi rakyat.

Sebagai organisasi ekonomi yang didirikan berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, kolaborasi, dan demokrasi ekonomi, koperasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Koperasi merupakan komponen vital dalam memperkuat ekonomi lokal karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap permodalan, memperluas jaringan usaha mikro dan kecil, serta membangun solidaritas sosial yang memperkuat ikatan antar warga desa. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai pembina dan fasilitator menjadi faktor penting bagi keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain dukungan administratif dan struktural, keberhasilan koperasi desa juga sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga tersebut di tengah masyarakat. Legitimasi sosial dapat dipahami sebagai tingkat penerimaan, kepercayaan, serta pengakuan masyarakat terhadap keberadaan dan peran suatu lembaga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks koperasi desa, legitimasi sosial tercermin dari sejauh mana masyarakat mempercayai koperasi sebagai lembaga ekonomi bersama, bersedia menjadi anggota, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta memanfaatkan layanan yang disediakan. Tanpa adanya legitimasi sosial yang kuat, koperasi cenderung mengalami kesulitan dalam membangun partisipasi anggota, menjaga keberlanjutan usaha, serta

mengembangkan kelembagaan secara mandiri. Oleh karena itu, peran pemerintah desa tidak hanya sebatas membentuk dan memfasilitasi koperasi secara administratif, tetapi juga membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat agar koperasi memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Kabupaten Banyuwangi, salah satu wilayah di Jawa Timur, dikenal berhasil menerapkan otonomi daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten ini melaksanakan berbagai inovasi untuk memperkuat ekonomi rakyat, salah satunya melalui pendirian Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi desa yang inklusif dan menekankan kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan program nasional penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM yang dicanangkan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi (Alflahul, 2025). Inpres No. 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sekaligus memperkuat peran pemerintah desa sebagai fasilitator pengembangan ekonomi lokal. Sampai tahun 2025, telah terbentuk 217 Koperasi Merah Putih yang tersebar di berbagai desa di Banyuwangi, berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus sarana pembelajaran masyarakat dalam manajemen usaha, pendampingan kelembagaan, dan penguatan nilai gotong royong.

Salah satu desa yang aktif mengembangkan Koperasi Merah Putih adalah Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan dokumentasi desa (Peraturan Desa Genteng Kulon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), koperasi ini dibentuk sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM berbasis desa. Desa Genteng Kulon memiliki jumlah penduduk sekitar 19.435 jiwa dengan potensi ekonomi yang besar, terutama melalui aktivitas perdagangan di pasar desa dan dua pusat perbelanjaan modern yang menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat (Prasetyo, 2023). Kondisi ini menjadikan Genteng Kulon sebagai desa dengan potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan model pemberdayaan masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Desa Genteng Kulon menunjukkan berbagai dinamika. Terlepas dari keterlibatan pemerintah desa dalam pendirian dan pengelolaan koperasi, terdapat perbedaan dalam pemahaman masyarakat tentang peran koperasi sebagai entitas ekonomi bersama. Selain itu, terdapat variasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat dalam operasional koperasi di setiap tahapan, termasuk pemantauan kelembagaan, pelaksanaan bisnis, dan perencanaan. Contoh ini menggambarkan bagaimana gagasan koperasi sebagai organisasi ekonomi partisipatif berbeda dari pola keterlibatan masyarakat yang sebenarnya.

Insiden ini menunjukkan betapa sulitnya memperkuat struktur koperasi di tingkat lokal. Penting untuk mempertimbangkan koneksi kelembagaan, kapasitas aktor, dan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat ketika menganalisis peran pemerintah desa dalam mendukung dan membimbing koperasi. Perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat berdampak pada jenis dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan koperasi, yang mengarah pada berbagai pola partisipasi. Akibatnya, peristiwa ini menciptakan peluang studi untuk memahami bagaimana lembaga Koperasi Merah Putih diperkuat oleh pemerintah desa dan bagaimana dinamika keterlibatan masyarakat dihasilkan dalam konteks ini..

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Di Desa Genteng Kulon, serta sejauh mana peran tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi bersama. Penelitian ini diharapkan pula dapat mengungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dan koperasi, sekaligus merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang tepat dan berkelanjutan guna mendorong terwujudnya desa yang mandiri, produktif, serta memiliki daya saing yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Bagaimana peran pemerintah desa dan

partisipasi masyarakat dalam penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Desa Genteng Kulon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Desa Genteng Kulon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator, pembina, dan penggerak dalam pengembangan koperasi desa, serta bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan kelembagaan koperasi tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pengelola koperasi dalam merumuskan strategi yang lebih partisipatif guna meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat keberlanjutan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

1.4 Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis

Tujuan dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih secara efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi lokal yang berbasis koperasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengurus Koperasi Merah Putih Desa Genteng Kulon sebagai bahan evaluatif untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, transparansi, serta akuntabilitas koperasi sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan minat masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam kajian teori kelembagaan dan penguatan lembaga ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih serta keterkaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan teori kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penguatan kelembagaan koperasi desa dalam kerangka otonomi daerah dan pembangunan yang menekankan partisipasi masyarakat.

